

## **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG DINAS PARIWISATA KOTA PADANG DALAM TASTE OF PADANG (SEBELUM DAN SAAT PANDEMIC COVID-19 BERLANGSUNG)**

**MUSRI**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti Padang  
Email: musmawa95@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan pemikiran bahwa kota Padang memiliki banyak kawasan wisata yang tidak kalah jauh dari kawasan wisata yang ada di kota-kota lain yang sangat digemari untuk di kunjungi oleh wisatawan lokal, luar daerah bahkan mancanegara sekalipun. Oleh sebab itu pemerintah Kota Padang memberikan slogan berupa “TasteOf Padang” dalam hal ini pemerintah kota padang padang berkontribusi dalam memajukan wisata yang ada di kota padang agar semakin terkenal dan banyak dikunjungi sehingga bisa memajukan ekonomi masyarakat yang tinggal disekir kawasan wisata tersebut. Akan tetapi semenjak Covid-19 melanda seluruh dunia hal ini pasti memberikan dampak terhadap kawasan wisata kota padang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana implementasi perda nomor 3 tahun 2020 tentang Dinas Pariwisata dalam PariwisataTasteOf Padang, 2. kendala yang ditemui dalam Implementasi perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dinas PariwisataKotaPadang Dalam TasteOf Padang ( sebelum dan saat pandemicCovid-19 berlangsung ) 3. Dampak dari ImplementasiPerda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dinas PariwisataKotaPadang dalam TasteOf Padang( sebelum dan saat pandemic Covid-19 berlangsung). Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa imlementasi perda nomor 3 tahun 2020 tentang dinas pariwisata, untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi implementasi, untuk mengetahui dampak-dampak dari kebijakan dinas pariwisata kota padang.

**Kata Kunci:** Implementasi perda nomor 3 tahun 2020 tentang Dinas Pariwisata

### **A. Pendahuluan**

Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditas minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2016, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 11.525.963 juta lebih atau tumbuh sebesar 10,79% dibandingkan tahun sebelumnya.

Implementasi kebijakan, berdasarkan pendekatan kerjasama dan pendekatan faktual dapat dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan pada tahap implementasinya dan keberhasilan proses implementasi ditentukan oleh kemampuan implementor, yaitu: 1) kerjasama implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan dan 2) kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan factual Keberhasilan implementasi ke-bijakan atau program juga dapat dikaji berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai (perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan perangkat Daerah Kota Padang dan peraturan Walikota Padang Nomor 80 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pariwisata bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata, serta tugas perbantuan.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup:

- a. Sejuahmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- c. Sejuahmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat .
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Fungsi implementasi adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran di wujudkan sebagai *outcome* (hasil akhir dilakukan pemerintah) Oleh sebab itu mencakup penciptaan *policydeliverysystem* penyelenggaraan kebijaksanaan negara yang biasanya terdiri atas cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Contoh penerapan implementasi ialah usaha juru pendidik di Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila pada anak didiknya. Bisa juga diamati dari cara orang tua dalam mendidik anak-anaknya di rumah. Bila dalam lingkup perusahaan, implementasi bisa diamati dari cara masing-masing orang sesuai kedudukannya menjalankan fungsi dan standar kerjanya masing-masing di perusahaan terkait dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya seorang reporter menerapkan ilmu jurnalistik yang mereka dapat dibangku kuliah selama bekerja di redaksi. Bila Anda seorang pengusaha, maka implementasi dapat dirasakan dari cara Anda mengelola sumber daya manusia di dalam perusahaan Anda.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian akytifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, mupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya dan keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplemetasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulais kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sring di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputudan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi menurut George C. Edwards III, Implementasi dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat

implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut harus dapat dilaksanakan secara bersamaan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan erat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III adalah :

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian akytifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah peraturan pemerintah, keputusan presiden, mupun peraturan daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya dan keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplemetasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulais kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sring di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Intruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll.

teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi menurut George C. Edwards III, Implementasi dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat implementasi kebijakan dapat berhasil. Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, struktur birokrasi.

Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri No 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah".

Pengertian peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibagi dalam 2 pengertian, yakni peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Pengertian peraturan daerah provinsi disebutkan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut : Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pengertian peraturan daerah yang telah diatur dalam Permendagri dan Undang-Undang pada prinsipnya merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah. Di Indonesia, Pemerintahan Daerah terbagi atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah terdiri atas dua unsur, yakni Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan DPRD.

Kepala pemerintah daerah di tingkat provinsi adalah Gubernur, kepala pemerintah daerah di tingkat kabupaten adalah Bupati dan Kepala Daerah di tingkat Kota disebut Walikota. Demikian pula dengan DPRD, di tingkat Provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Pengertian peraturan daerah dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah secara umum menyebutkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah di bentuk oleh DPRD, bila di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan bila di tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan DPRD Kabupaten/Kota, dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan dan perangkat Daerah Kota Padang dan peraturan Walikota Padang Nomor 80 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pariwisata bertugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang pariwisata, serta tugas perbantuan. Tugas ini pada dasarnya merupakan manifestasi fungsi dalam :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepariwisataan
2. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pariwisata
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Keselaras tugas dan fungsinya ini akan berdampak terhadap aspek-aspek strategis yang di jalankan oleh dinas pariwisata kota padang secara keseluruhan, kerna budaya dan wisata dalam koridor kepariwisataan cenderung tak terlepas dari tugas dan fungsi yang dimiliki. Sementara antara tugas dan fungsi terdapat celah positif dimana harus peningkata kawasan yang konduktif bukan lagi sekedar intuisi, tapi suatu rencana yang harus diwujudkan.

## **B. Metode Penelitian**

### **Metode yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Deskriptif Analitik. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi peneliti, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Menurut Meleong. “Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka-angka”. Sedangkan menurut Sugono penelitian adalah “cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu”. sedangkan Bog dan Tylor mengatakan bahwa “metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti dalam suatu kegiatan penelitian. Menurut Hadari Namawi, Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala sosial karakteristik tertentu dalam suatu penelitian Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan aparatur Dinas Pariwisata seluruh pengunjung pariwisata dan masyarakat yang berada pariwisata, dampak dari suatu kebijakan dinas pariwisata

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik “ *Purposive Sampling*” yang berdasarkan pengambilan menurut tujuan, dan berkriteria. Sampel adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Adapun beberapa pertimbangan peneliti dalam diantaranya sampel sebanyak dua (2) orang meliputi kriteria beberapa diantaranya dinas pariwisata dan masyarakat di wilayah pariwisata

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, dan data tersebut dapat dipercaya sebenarnya, dengan objek yang sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, kebenarannya perangkat instrumen sangat menentukan dalam pengumpulan data.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

Data Primer merupakan hasil penelitian langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti dengan melakukan wawancara dengan responden yaitu Pemerintahan Dinas pariwisata dan masyarakat serta pengunjung

Data Sekunder yaitu data Penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari kesatuan-kesatuan yang berwenang dan terkait, seperti berupa dokumen dan arsip. Salah satu data yang diambil berupa profil Dinas pariwisata

#### **Analisis Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana semua data di peroleh kemudian dikumpulkan, selanjutnya dipilih dan di klasifikasikan semua pokok-pokok permasalahan yang hendak dibahas, untuk menilai pemecahan baru dari segi kebutuhan dimasa mendatang. Sehingga data yang relevan dengan penulisan yang bersifat khusus dengan kata lain dari pengertian umum menjadi pengertian khusus. Data yang diperoleh di lapangan kemudian digabungkan atau di sesuaikan dengan bahan yang akan diperoleh sewaktu penilaian. Sehingga pokok permasalahan dapat terlihat dengan jelas, dan perbaikan atas masalah-masalah yang ditemui dapat ditanggulangi.

#### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah berlokasi dinas pariwisata dan di tempat pariwisata di kota padang. Lokasi ini dipilih karena objek wisata dan wisatawan mancanegara sering datang untuk menikmati keindahan pantai dan berselancar. Penelitian ini dimulai dengan menyerahkan revisi proposal penelitian kepada jurusan pada bulan Maret. Setelah diumumkan dosen pembimbing, maka proses bimbinganpun dimulai dan dilanjutkan dengan studi ke lapangan. Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian lapangan dinas pariwisata pada tanggal 17 November 2021 samapai pada tanggal 19 Januari 2022

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Bagaimana implementasi perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dinas Pariwisata Kota Padang Dalam TasteOf Padang (Sebelum Dan Saat Pandemic Covid-19 Berlangsung)**

Wawancara dengan Bapak tri pria anugrah selaku kasi destinasi dan daya tarik pariwisata, dinas pariwisata kota padang menyatakan bahwa :

“Sebelum kita melakukan kegiatan, pertama-tama kita melakukan perencanaan penganggaran untuk satu (1) tahun, agar setiap kegiatan yang kita laksanakan teranggarkan dengan jelas, setelah melakukan perencanaan penganggaran kita melakukan evaluasi kinerja atau penilaian hasil kegiatan dilapangan secara berkala, ini kita lakukan agar setiap kegiatan di lakukan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya, kebijakan sebelum covid-19”.

Wawancara dengan bapak okdeli staf destinasi dan daya tarik pariwisata dinas pariwisata kota padang menyatakan bahwa :

Disaat pandemi covid-19 berlangsung staf serta kepala bidang dinas pariwisata perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja staf dinas pariwisata kota padang, mulai berkurang yang memantau di lapangan Cuma 1 (satu) orang dan perencanaan nya kegiatan ini dengan cara online menggunakan aplikasi zoom biar tidak tersebar nya covid-19 di kantor dinas pariwisata ada beberapastaf di rumah kan serta kerja di rumah.

#### **Apa Saja Kendala Yang Mempengaruhi Kebijakan Dinas Pariwisata Dalam Pariwisata TasteOf Padang Sebelum Dan Sesaat Pandemi Covid-19 Berlangsung.**

Wawancara dengan Bapak yeri yanto selaku staf dinas pariwisata menyatakan bahwa Memang kita masih ada beberapa kendala dalam hal memfasilitasi objek-objek wisata yang ada di kota padang seperti paket kapal antar pulau masih terbatas/kurang memadai, pemandu pariwisata kita juga masih kurang sehingga pengunjung dari luar tidak tahu objek wisata yang ada di kota padang. Restoran memang sudah ada di beberapa titik objek wisata namun masih terbatas, dan objek wisata kita kurang terpelihara dan bahkan terlantarkan karena rendahnya kemampuan pengelolaan dan hasil pengelolaan sehingga kita kalah saing dengan objek wisata di daerah lain, akan tetapi ini akan kita usahakan kedepannya agar lebih baik untuk kedepannya kendala sebelum covid-19”.

Saat pandemi covid-19 kendala di pariwisata banyak masyarakat atau pekerja yang di rumahkan di larang berkumpul di suatu tempat umum dan itu berdampak dari sektor pariwisata tapi kami membuat kebijakan yang bisa pergi wisata harus ada kartu vaksinasi covid-19'

#### **Apa Saja Dampak Dari Kebijakan Pariwisata di Kota Padang Dalam Pariwisata TasteOf Padang Sebelum dan Saat Pandemi covid-19 Berlangsung**

Wawancara dengan bapak tri pria anugrah salaku kasi destinasi dan daya tarik pariwisata menyatakan bahwa : dampak dari kebijakan pkm saat berdampak di sektor pariwisata penghasilan saat turun drastis di kerenaan di bataskan kegiatan masyarakat di larang berkumpul di suatu tempat''. Saat covid 19 Wawancara dengan ibuk siti Gloria selaku kasi evaluasi dan pelaporan menyatakan bahwa

Ada beberapa kebijakan yang kita ambil selama pandemi covid-19 berlangsung salah satunya penutupan objek wisata saat liburan, ini kita lakukan untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berisiko meningkatnya kasus covid-19, selain objek wisata, restoran dan cafe hanya diperkenankan menerima pesanan dibawa pulang, di tahun baru 2022 kita mengambil kebijakan yaitu dengan membuka objek wisata, akan tetapi pengunjung yang datang harus memiliki kartu vaksin dan mengikuti protokol kesehatan, kebijakan ini kita buat untuk mengurangi penularan covid-19''.

#### **D. Penutup**

Kesimpulan merupakan suatu proposisi atau kalimat yang disampaikan dan diambil beberapa premis atau ide pemikiran sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Setelah melakukan penelitian akhirnya penulis sampai pada kesimpulan yang mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini.

1. Implementasi kebijakan dinas pariwisata kota padang dalam pariwisata tasteof padang (sebelum dan saat pandemic covid-19 berlangsung), adapun bentuk implementasi kebijakan dinas pariwisata kota padang yaitu perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja staf dinas pariwisata kota padang, melakukan pelatihan sesuai dengan jabatan masing-masing, melakukan promosi objek wisata kota padang di website, facebook dan instagram, pelatihan keamanan dan keselamatan pengunjung, dan partisipasi masyarakat disekitar objek wisata.
2. kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan dinas pariwisata kota padang dalam pariwisata tasteof padang ( sebelum dan saat pandemic covid-19) yaitu fasilitas objek wisata yang kurang memadai, kurang promosi objek wisata, pungli, parkir liar, konflik/kerusuhan, dan anggaran yang sulit karena sepi nya pengunjung akibat covid-19.
3. dampak dari implementasi kebijakan dinas pariwisata kota padang dalam pariwisata tasteof padang (sebelum dan saat pandemic covid-19 berlangsung) yaitu sebelum pandemic covid-19 dinas pariwisata kota padang melakukan pelatihan pengembangan Desa Wisata dan dimasa pandemic berlangsung dinas pariwisata kota padang melakukan penutupan objek wisata dan baru-baru ini dinas pariwisata kota padang membuka objek wisata dengan syarat pengunjung harus memiliki kartu vaksin dan mematuhi protokol kesehatan.

#### **DaftarPustaka**

##### **A. Buku-buku**

- Dr. Drs. Suparno, m.si 2015, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PRAKTEK*, kabupaten rembang : pusta hal 16
- Gaffar Ahan,2009,*Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*.Yogyakarta:pusaka belajar
- HAEDAR AKIB, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, dalam Jurnal Administrasi Publik, ( Makassar: Universitas Negeri Makassar), Volume 1 No. 1 . 2010
- Hadari Narawi, *Metode Penelitian Sosial*, UGM, Yogyakarta, 1985,
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo, Jakarta, 2002,
- Ridwan, 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta,

**B. Jurnal**

Firmanda Satria, Fadillah, *Konsep citybranding dan identifikasi nilai lokal pada kota-kota Indonesia dalam mendukung nationbranding Indonesia* dalam jurnal, Institut Teknologi Bandung, Vol.8, No.2, Januari 2021

**C. Perundang-undangan**

Permendagri No 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Di lansir pada situs <https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>

**D. Internet/ Websit**

Dilansir pada situs [https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Indonesia)

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

Dilansir pada situs <https://www.suara.com/news/2021/02/09/175201/apa-itu-implementasi-tujuan-dan-contoh-penerapannya?page=all>